

## PERGERAKAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF PARTISIPASI POLITIK : PARTISIPASI OTONOM ATAU MOBILISASI

ANDRIAS DARMAYADI, MSi  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
FISIP – Universitas Komputer Indonesia  
Bandung, 40132, Indonesia  
E-mail : andredarma@yahoo.com

*Secara konseptual partisipasi politik adalah membicarakan kegiatan dan aktivitas individu warga Negara dalam proses kehidupan politik. Warga Negara dituntut turut aktif dalam proses pembuatan dan perumusan kebijakan politik Negara. Mahasiswa disebut sebagai masyarakat intelektual dengan harapan sebagai generasi emas yang selalu mampu menjadi agen perubah dalam struktur masyarakat. Partisipasi politik mahasiswa menjadi lebih bernilai dikarenakan anggapan memiliki konsep pemahaman politik yang lebih baik sebagai konsekuensi dan buah pembelajaran di tingkat perguruan tinggi. Keadaan ini yang dianggap sebagai salah satu faktor pembeda antara mahasiswa dengan masyarakat biasa disekitarnya. Permasalahan yang sering muncul dalam menganalisis pergerakan mahasiswa adalah, apakah partisipasi tersebut otonom yang artinya tumbuh secara mandiri ataukah merupakan bentuk partisipasi mobilisasi. Tulisan ini tidak bermaksud untuk mendikotomikan secara tegas apa muara dan kemana arah partisipasi politik mahasiswa berdasarkan dua tipologi tadi, namun lebih untuk mencoba melihat relasi dan keterkaitan dua tipologi partisipasi politik mahasiswa guna menghitung kekuatan dari partisipasi politik kaum intelektual muda ini.*

*Key words :Partisipasi Politik, Gerakan Mahasiswa, Pendidikan politik, elit*

### PENDAHULUAN

Studi partisipasi politik sebenarnya merupakan bagian dari pendekatan tingkah laku (*behavioralism*) dalam ilmu politik, bagian penting dalam studi pembangunan politik. Meskipun pembangunan politik ditujukan sebagai respons Barat dalam peranannya di negara-negara dunia ketiga, studi mengenai partisipasi politik bukanlah menjadi milik barat dan hanya terjadi di Barat, justru negara dunia ketiga-lah yang seringkali dijadikan objek sekaligus subjek dalam studi ini.

Pada awalnya kecenderungan ke arah partisipasi rakyat yang lebih luas (yang menjadi ciri dari modernisasi politik) dalam politik bermula pada masa *Renaissance* dan *Reformasi* di abad 15 sampai abad 17 dan

memperoleh dorongan yang lebih kuat di masa *enlightment* dan Revolusi Industri di abad 18 dan 19. Menurut Myron Wiener paling tidak ada lima hal yang menyebabkan munculnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas.<sup>1</sup> Kelima hal tersebut, **pertama**, Modernisasi: komersialisasi pertanian, industrialisasi urbanisasi yang meningkat, penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media massa. Ketika masyarakat pada sebuah kota baru seperti buruh, pedagang dan kaum professional lainnya merasa

<sup>1</sup>Gabriel A. Almond, "Interest Group and Interest Articulation" dan "Political Party and Party System," dalam *Comparative Politics Today*, Boston: Little, Brown and Company, 1974 terjemahan x, 2000, halaman 45-46.

bahwa mereka mampu untuk mempengaruhi nasib mereka sendiri, mereka semakin menuntut untuk ambil bagian dalam kekuasaan politik.

**Kedua,** Perubahan-perubahan Struktur Kelas sosial. Munculnya kelas pekerja baru dan kelas menengah secara luas. Memberi penekanan pada peluang mengenai siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik yang memberi perubahan pada pola partisipasi politik.

**Ketiga,** Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern. Kaum intelektual seperti sarjana, filsuf, pengarang dan wartawan seringkali mengemukakan gagasan-gagasan mengenai egalitarianisme dan nasionalisme kepada masyarakat. Kenyataan seperti ini pada akhirnya akan memberikan semangat bagi tuntutan akan partisipasi massa yang meluas dalam proses pembuatan keputusan politik. Komunikasi dan transportasi modern mempercepat bagi transfer gagasan tersebut kepada masyarakat. Melalui kaum intelektual dan komunikasi massa modern, gagasan tentang demokratisasi partisipasi menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk negara-negara baru, negara dunia ketiga.

**Keempat,** Konflik di antara kelompok pemimpin politik. Munculnya konflik dan kompetisi politik di tataran elit memungkinkan mereka untuk mencari dukungan kepada massa rakyat. Aktifitas mencari dukungan seperti ini pada gilirannya memunculkan gerakan persamaan hak. Dengan kata lain aktifitas mencari dukungan yang dilakukan oleh elit telah memaksa rakyat untuk memperjuangkan hak pilihnya.

**Kelima,** Keterlibatan Pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Perluasan bidang kegiatan pemerintahan memunculkan konsekuensi bagi tindakan-tindakan pemerintah yang menjadi kian menyentuh aktifitas masyarakat keseharian. Hal ini merangsang

munculnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Ditinjau dari aspek kesejarahan, Revolusi Perancis, paling tidak bisa mewakili ketika kita berbicara mengenai partisipasi politik. Pada masa ini muncul tuntutan akan kesamaan (*egalite*). *Egalite* bagi revolusi Perancis merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi partisipasi di Perancis, yaitu dengan munculnya kelas-kelas baru di masyarakat Perancis selama abad 18. Setelah itu partisipasi politik meluas hampir di seluruh Eropa, ketika partai politik mulai muncul dan berkembang. Asumsinya adalah bahwa industrialisasi menyebabkan muncul dan berkembangnya kelompok-kelompok yang sadar akan kemampuannya dalam melihat kebutuhan dan kesadaran mereka.<sup>2</sup>

### Partisipasi Politik: Pengertian, Bentuk dan Tipologi

Miriam Budiardjo dalam tulisannya mengenai partisipasi dan partai politik mendefinisikan partisipasi politik secara umum sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).<sup>3</sup> Pertanyaannya adalah, kegiatan seperti apakah yang dikategorikan sebagai partisipasi politik? Hal ini menyangkut konseptualisasi mengenai partisipasi politik. Konseptualisasi merupakan upaya menyusun rambu-rambu sebagai criteria untuk menentukan apakah suatu fakta termasuk atau tidak termasuk ke dalam

<sup>2</sup>Lebih jelasnya baca tulisan C.H.Dodd., dalam *Political Development*, yang telah diterjemahkan menjadi *Pembangunan Politik*, Jakarta: Bina Aksara 1986, halaman 19-22

<sup>3</sup>Miriam Budiardjo (ed), *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1982, halaman 1

Tabel. 1. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non Konvensional
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian Suara (voting)</li> <li>• Diskusi Politik</li> <li>• Kegiatan Kampanye</li> <li>• Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan</li> <li>• Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan Petisi</li> <li>• Berdemonstrasi</li> <li>• Konfrontasi</li> <li>• Mogok</li> <li>• Tindak kekerasan politik terhadap harta-benda (perusakan, pengeboman, pembakaran)</li> <li>• Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) Perang gerilya dan revolusi</li> </ul>

Sumber: Almond, 2000

konsep tersebut.<sup>4</sup>

Selanjutnya Ramlan Surbakti memberi rambu-rambu atau batasan mengenai partisipasi politik sebagai, **pertama**, partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi. Karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. **Kedua**, kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. **Ketiga**, kegiatan yang berhasil dan efektif maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah. **Keempat**, kegiatan mempengaruhi pemerintah baik secara langsung-tanpa perantara- dan mempengaruhi pemerintah dengan menggunakan perantara-misalnya dengan menggunakan kelompok penekan yang dianggap mampu meyakinkan pemerintah. **Kelima**, kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan tanpa kekerasan misalnya seperti ikut

memilih dalam pemilu, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, menulis surat, maupun kegiatan non konvensional dan dengan kekerasan (*violence*) seperti demonstrasi pembangkangan, mogok dan sebagainya.

Selanjutnya, kegiatan individu untuk mempengaruhi pemerintah ada yang dilakukan atas kesadaran sendiri (otonom) juga yang dilakukan dengan desakan, manipulasi dan paksaan dari pihak lain (mobilisasi), seperti yang dicermati oleh Huntington dan Joan Nelson dalam risetnya di berbagai negara.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam karya terkenalnya mengenai studi partisipasi politik, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*,<sup>5</sup> mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis,

<sup>4</sup>Baca: Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1992, halaman 140-142

<sup>5</sup>Terjemahan Indonesianya menjadi Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta: Rineka Cipta, cetakan kedua 1994.

secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, dan efektif atau tidak efektif.<sup>6</sup>

Sebagai kegiatan, partisipasi juga dapat dibedakan bila dilihat aktif tidaknya individu dalam kegiatan tersebut. Partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan *output* politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses *output*.<sup>7</sup> Yang termasuk partisipasi aktif seperti mengajukan usul mengenai suatu kebijakan, mengajukan alternatif kebijakan, kritik, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintahan. Sedangkan dalam kategori pasif seperti kegiatan yang menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan secara penuh setiap keputusan dan sebagainya.

Pada bagian lain Lester Milbrath dan M.L. Goel<sup>8</sup> (1977), memberikan kategorisasi berdasarkan keterlibatan warga negara dalam kegiatan politik, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Herbert McLosky. Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi,

**pertama**, apatis. Artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.

**Kedua**, spectator. Artinya, orang yang tidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.

**Ketiga**, gladiator. Artinya, mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik yaitu sebagai komunikator, aktifis partai, dan sebagainya.

**Keempat**, pengkritik, yaitu dalam bentuk partisipasi non konvensional.

Apatisme politik individu seperti ini oleh McLosky<sup>9</sup> disebut sebagai *apathy*, bahwa ada yang tidak ikut pemilihan

karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh, atau kurang paham mengenai masalah politik. Juga karena ketidakpercayaan bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil dan ada juga yang sengaja tak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan (minoritas) dimana ketidak-ikutsertaan adalah hal yang terpuji.

### Partisipasi Mobilisasi Versus Partisipasi Otonom

Huntington dan Nelson dalam perspektif pembangunan politik melihat terjadi penolakan yang diametral antara partisipasi politik yang otonom dan yang *mobilize*. Meskipun oleh Huntington dan Nelson penolakan yang diametral ini mereka tempatkan pada lokus yang sama, yaitu partisipasi politik. Mereka berargumen bahwa kedua kategori ini masih bisa dimasukkan dalam pola-pola partisipasi politik dengan alasan, **pertama**, perbedaan antara partisipasi yang dimobilisasikan dan partisipasi yang otonom adalah lebih tajam dalam prinsip daripada di dalam realitas. Hal ini terlihat ketika kita dapat mengidentifikasi banyak kegiatan sebagai sesuatu yang nyata dimobilisasikan ataupun otonom, tetapi banyak sekali kasus yang terletak di perbatasan keduanya. Kasus yang nyata dan dapat diteliti lebih lanjut adalah mengenai pergerakan mahasiswa yang akhir-akhir terjadi.

Di satu sisi terlihat bahwa gerakan mahasiswa tersebut adalah berdiri sendiri, dengan kata lain atas muncul dari idealisme mahasiswa sendiri, tetapi disisi lain banyak juga gerakan mahasiswa yang muncul atas tawaran dari berbagai pihak yang ada di belakangnya. Oleh karena itu, masih menurut Huntington dan Nelson, partisipasi yang dimobilisasikan dan yang otonom bukanlah merupakan kategorisasi yang dikotomis untuk membedakan secara tajam satu sama lain.

**Kedua**, hampir semua sistem politik merupakan dan mencakup suatu campuran partisipasi yang dimobilisasi

<sup>6</sup>Budiardjo, Miriam, *op.cit.* halaman 2

<sup>7</sup>Surbakti, *op. cit.* hal. 142

<sup>8</sup>ibid, hal. 143, karya asli Milbrath dan Goel, *Political Participation*, Chicago: Rand McNally College Publishing Co, 1977

<sup>9</sup>Budiardjo, *op.cit.* hal. 4. karya asli Herberth McLosky, "Political Participation", *International Encyclopedia of The Social Sciences*, New York: The Macmillan Company and The Free Press, 1972.

dan yang otonom. Maksudnya, tingkat partisipasi yang otonom yang umumnya terjadi atau lebih tinggi di dalam sistem politik yang demokratis dibandingkan dalam sistem politik yang otoriter, di sisi lain ada juga partisipasi politik yang otonom di sistem politik yang diktator dan otoriter. Indonesia masa pemerintahan Soeharto-bila disepakati sebagai rezim yang otoriter- ternyata juga berhasil memunculkan gerakan-gerakan aktif yang benar-benar otonom untuk berbuat demi bangsanya. Karenanya, dengan membatasi perhatian hanya pada partisipasi politik yang otonom, kita akan terjebak pada kesimpulan yang keliru, bahwa partisipasi politik merupakan fenomena yang hanya terdapat dalam kehidupan politik yang demokratis.

**Ketiga**, menelaah partisipasi baik yang otonom dan partisipasi yang dimobilisasikan, berkaitan dengan adanya hubungan yang dinamis antara dua kategori tersebut. Bahwa perilaku yang awalnya merupakan partisipasi yang dimobilisasikan dapat menjadi terinternalisasi menjadi otonom. Aktifis partai yang pada awalnya dimobilisasi untuk masuk dalam partai tertentu, pada akhirnya –dengan proses internalisasi menjadi pembela partai yang otonom (baca: partisan). Contoh yang paling mutakhir untuk menjelaskan hal ini adalah fenomena aktifis gerakan mahasiswa ataupun aktifis LSM yang tadinya dimobilisasi untuk berkecimpung masuk dalam partai, pada akhirnya menjadi seorang partisan yang dengan gigih membela partainya sampai titik darah yang penghabisan. Sebaliknya partisipasi yang tadinya otonom, bisa kemudian menjadi partisipasi yang dimobilisasikan ketika terjadi manipulasi, propaganda dan infiltrasi.

**Keempat**, untuk melihat apakah suatu kegiatan atau partisipasi yang otonom atau termobilisasikan, adalah bahwa keduanya memiliki konsekuensi penting bagi sistem politik. Bahwa kedua jenis partisipasi ini memberikan peluang bagi pemimpin dan kekangan sekaligus. Bahwa pemimpin dapat berbuat apa saja terhadap pengikutnya ketika pengikutnya tersebut

berpartisipasi termobilisasi, sebaliknya akan sulit bagi seorang pemimpin untuk menggerakkan massanya ketika pengikutnya tersebut memiliki partisipasi yang otonom. Kecenderungan saat ini menjadi contoh sederhana untuk alasan ini.

Berlatarbelakang alasan inilah Huntington dan Nelson dari penelitiannya memberikan landasan teoritis bahwa partisipasi politik dapat berakar dalam landasan golongan ataupun kelas kolektif yang berbeda. Karenanya, sangat mungkin menganalisis partisipasi politik dari sisi tipe organisasi kolektif penyelenggara partisipasi. Tipe kolektifitas tersebut antara lain, *pertama*, kelas: perorangan dengan status sosial dan tingkat pendapatan yang sama tingkatannya. *Kedua*, Kelompok atau komunal, berisi perorangan yang serupa dari sisi ras, agama bahasa dan etnisitas. *Ketiga*, Lingkungan, perorangan yang secara geografis serupa atau bertempat tinggal berdekatan satu sama lain. *Keempat*, Partai, perorangan yang diidentifikasi dan mengidentifikasi diri dalam organisasi politik formal yang sama dan terakhir, *kelima* adalah golongan yang berisi perorangan dalam satu faksi, yang muncul sebagai akibat dari interaksi dan intensitas yang dimanifestasikan dalam proses pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Manifestasi dari seseorang yang berpartisipasi sering diartikan ketika seseorang tersebut aktif dan mempunyai *aliran darah* dalam sebuah partai politik paling tidak ketika memilih dalam pemilu. Hal ini sedikit banyak dapat dibenarkan oleh banyak sarjana ilmu politik, karena partai politik identik dan khas bagi partisipasi politik. Mereka beranggapan bahwa partai politik dapat dijadikan sebagai mesin politik bagi partisipasi politik terlepas apakah partisipasi politik yang muncul adalah partisipasi politik yang otonom maupun partisipasi yang dimobilisasikan. Huntington dengan karyanya yang terkenal *Political Order in Changing Societies*<sup>10</sup> dapat dimasukkan dalam kelompok sarjana ini, juga Joan M. Nelson, Gabriel A. Almond, Sydney Verba,

David E. Apter. Sigmund Neumann dan lainnya. Dalam kaitan ini Neuman memberikan definisi mengenai partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya dalam pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan kata lain partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.<sup>11</sup>

Dengan demikian partai politik dapat dikatakan sebagai alat atau perantara bagi partisipasi politik karena memang sebagian besar-untuk tidak mengatakan secara total- fungsi-fungsi yang ada dan melekat pada partai politik sangat *compatible* bagi partisipasi politik. Fungsi-fungsi yang melekat tersebut antara lain<sup>12</sup>, *pertama*, pelaksana sosialisasi politik. Bahwa partai politik berfungsi sebagai alat bagi proses pembentukan sikap dan orientasi para anggota masyarakat. Baik yang dilakukan melalui pendidikan maupun melalui proses indoktrinasi.

<sup>10</sup>Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies* terjemahan Indonesia nya diterbitkan oleh Rajawali Pers menjadi *Tertib Politik di dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983. Buku Huntington ini merupakan hasil penelitiannya di berbagai negara di Asia, Amerika Latin dan Afrika yang sedikit banyak menggambarkan tentang pentingnya modernisasi yang dilindungi oleh stabilitas politik (baca: tertib politik) dimana Partai Politik menjadi salah satu kekuatan bagi terciptanya partisipasi politik yang diperlukan dalam pembangunan politik di negara-negara tersebut. Dalam buku ini juga Huntington ingin memperlihatkan bagaimana partai politik dan partisipasi pada akhirnya menjadi bagian penting dalam proses modernisasi meskipun ditentang ketika Huntington ingin mempersamakan modernisasi politik dengan demokrasi.

*Kedua*, partai politik sebagai alat bagi rekrutmen politik. Bahwa partai politik dianggap melakukan seleksi dan pemilihan seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan sejumlah peranan dalam sistem politik. *Ketiga*, fungsi partai politik sebagai alat bagi partisipasi politik itu sendiri. *Keempat*, pemuatan kepentingan dari berbagai aspirasi masyarakat yang berbeda. *Kelima*, fungsi komunikasi politik dan *Keenam* sebagai pengendali konflik yang ada di masyarakat serta terakhir partai politik sebagai alat bagi kontrol politik, dalam hal ini yang sering terjadi kontrol terhadap penguasa.

### **Gerakan Mahasiswa: Partisipasi Otonom Ataupun Mobilize Partisipation<sup>13</sup>**

Maraknya aksi-aksi politik yang dilakukan oleh mahasiswa menjadikan mahasiswa sebagai "bintang" pada era reformasi ini. Perannya dalam menyuarakan aspirasi dan tuntutan masyarakat menjadikan mahasiswa selalu berada pada posisi terdepan dalam menentukan, mengantisipasi dan menjawab setiap persoalan maupun perubahan sosial. Ketajaman menganalisis masalah, kepekaan memandang realitas dan keteguhan memegang etika akademik yang ilmiah merupakan citra diri yang melekat pada pribadi seorang mahasiswa.

Mahasiswa menjadi obyek yang menarik. Hal ini disebabkan mahasiswa mempunyai "ciri khas tersendiri" yang membuat ia menjadi berbeda dengan masyarakat lainnya. Ciri khas dari mahasiswa adalah selain ia mempunyai pendidikan relatif tinggi, mahasiswa juga sebagai "mahluk" yang "kreatif" dalam perilakunya, "dinamis" dalam melakukan pencarian

<sup>11</sup>Budiardjo, *op.cit*, halaman 14

<sup>12</sup>Lihat Surbakti, *Op. Cit*. Halaman 116-121

<sup>13</sup>bagian ini ingin melihat partisipasi politik gerakan mahasiswa, bagaimana landasan teori berkembang di dalam kerangka aplikasi.

dan pengembangan potensi diri, "kritis" dalam melihat dan merespon realitasnya dan memiliki idealisme yang cukup tinggi. sehingga ia selalu sensitif terhadap apa yang terjadi pada lingkungan dimana ia hidup. Seperti yang dikemukakan Lewis Coser : "mahasiswa merupakan cendekia-awan, yaitu orang-orang yang kelihatannya tidak pernah puas menerima kenyataan sebagaimana adanya..., mereka memper-tanyakan kebenaran yang berlaku suatu saat, dalam hubungannya dengan kebenaran yang lebih tinggi dan lebih luas"<sup>14</sup>

Aktivitas politik yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan untuk menegakkan kondisi dan situasi lingkungan masyarakat.<sup>15</sup> Aktivitas politik berkaitan erat dengan aktualisasi - diri yang dipahami sebagai pengaktualan kemampuan, sehingga bisa berkembang kemudian menjadi aktif kreatif dan berkarya. Aktualisasi-diri dapat di realisasikan melalui pemahaman mahasiswa mengenai persoalan-persoalan sosial politik yang sedang terjadi, dengan cara berfikir secara kritis dan analitis, serta dapat menentukan sikap dalam menghadapi suatu permasalahan politik. Pemahaman dan pemikiran mahasiswa yang kritis terhadap berbagai masalah sosial politik disalurkan pada berbagai kelompok-kelompok diskusi, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi ekstra universiter (seperti: HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI dan sebagainya) dan organisasi intra universiter ( Senat Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa, Pers Kampus, dan lain sebagainya).

Menurut Al-Zastrouw<sup>16</sup>, aktivitas mahasiswa yang muncul terbagi dalam berbagai bentuk. **Pertama**, kelompok *asketisme-religi* yaitu kelompok yang ditandai dengan adanya semangat keagamaan yang tinggi,

tercermin melalui simbol-simbol formal dan syiar-syiar ritual keagamaan. **Kedua**, kelompok *profesional-individual* yang ditandai dengan adanya kompetisi yang cukup tinggi dalam bidang skill profesional. Ketiga, kelompok *konsumtif-hedonistik*, yaitu kelompok yang lebih menekankan aspek hura-hura dan kenikmatan duniawi semata. Keempat kelompok *proletariat* yaitu kelompok dengan gerakan yang langsung menyentuh pada persoalan masyarakat secara riil, sebagaimana manifestasi kesadaran dan kepedulian terhadap realitas yang ada. Kelima adalah kelompok *aktivis-organisatoris* yaitu kelompok mahasiswa yang melakukan kegiatan melalui organisasi formal.

Fenomena menarik yang patut dicermati adalah munculnya dua macam kelompok aktivitas mahasiswa. Kedua kelompok tersebut adalah pertama, "mahasiswa aktif" atau yang biasa disebut "aktifis" dan kelompok kedua yaitu "mahasiswa apatis". Seorang mahasiswa disebut sebagai aktifis jika ia tidak hanya menekuni disiplin ilmunya saja, tetapi ia juga ikut dalam berbagai kegiatan. Misalnya kelompok diskusi/kelompok studi, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi-organisasi ekstra dan intra universiter serta organisasi kepemudaan. Adalah jelas bahwa tugas pokok seorang mahasiswa adalah studi untuk mendapatkan keahlian dan ketrampilan berdasarkan suatu ilmu tertentu. Namun untuk menikmati hasil dari penerapan keahlian dan ketrampilan tersebut secara optimal, maka mahasiswa perlu melengkapi diri dengan pemahaman akan kondisi manusia dan masyarakat lingkungannya. Pemahaman akan kondisi tersebut disalurkan melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan diatas. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak saja peduli dengan kegiatan dan kepentingannya dalam menuntut ilmu tetapi ia juga *concern* terhadap masalah sosial politik yang berkembang di masyarakat. Melalui Kelompok studi dan LSM mahasiswa mendapatkan wadah untuk dapat menyumbangkan

<sup>14</sup>Arief Budiman, " Peranan Mahasiswa Sebagai *Intelegensia* " dalam Dick hartoko, *Golongan Cendekia-awan : mereka yang berumah diatas Angin*, Jakarta : PT.Gramedia,1980, hal.70

<sup>15</sup>Kartini Kartono, *Pendidikan politik*, Bandung : Mandar Maju, 1996, hal.xvi

<sup>16</sup>Ng.Al-Zastrow, *Reformasi Pemikiran*, Yogyakarta : LKPSM, 1998, hal. 140

pemikirannya dalam menyelesaikan permasalahan sosial politik yang ada disekitarnya, dengan cara ikut berbuat aktif dengan arah dan tujuan yang pasti, dengan mengikuti berbagai kegiatan pada organisasi intra/ekstra universitas maka seorang aktifis dapat mengembangkan aktivitas politiknya.

Pandangan dan cara berfikir yang dimiliki oleh seorang aktifis tentu berbeda dengan seorang mahasiswa apatis dimana ia hanya menjalani status kemahasiswaannya secara idealis dan melakukan kegiatan bersenang-senang. Mahasiswa seperti ini mempunyai pandangan bahwa tugasnya sebagai mahasiswa adalah kuliah, belajar dan mengejar kesenangan diri sendiri. Di satu pihak, mahasiswa apatis melakukan kewajibannya sebagai seorang mahasiswa yaitu hanya menekuni disiplin ilmunya untuk mendapatkan gelar sarjana. Di lain pihak mereka juga tidak lupa mengejar kesenangan-kesenangan pribadinya, misalnya jalan-jalan di mall, shopping, nonton, makan, ataupun berkumpul dengan teman sekelompoknya untuk berpesta atau ke klub kebugaran. Mahasiswa seperti ini hanya memikirkan kesenangan dan kepentingan dirinya. Mereka tidak tertarik dengan masalah-masalah sosial-politik yang berkembang disekitarnya, begitupula terhadap aktivitas politiknya.

Sebagai kaum intelektual, mahasiswa berpeluang untuk berada pada posisi terdepan dalam proses perubahan masyarakat. Sejalan dengan posisi mahasiswa di dalam peran masyarakat atau bangsa, dikenal dua peran pokok yang selalu tampil mewarnai aktivitas mereka selama ini. *Pertama*, ialah sebagai kekuatan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. *Kedua*, yaitu sebagai penerus kesadaran masyarakat luas akan problema yang ada dan menumbuhkan kesadaran itu untuk menerima alternatif perubahan yang dikemukakan atau didukung oleh mahasiswa itu sendiri, sehingga masyarakat berubah ke arah kemajuan.<sup>17</sup>

Menurut Arbi Sanit,<sup>18</sup> ada tiga bidang usaha yang perlu dilakukan agar dapat melahirkan mahasiswa yang kritis, yaitu melengkapi kemampuan mahasiswa, mengembangkan kehidupan kampus, dan menumbuhkan kehidupan politik serta kemasyarakatan sebagai pendorongnya.

**Pertama**, kemampuan pelengkap mahasiswa dimaksudkan sebagai pendamping keahlian dan ketrampilan yang mereka dapatkan melalui proses di luar kurikulum tersebut ialah kebolehannya dalam menganalisa dan memahami masalah kemasyarakatan dan politik, yang berguna bagi pembentukan sikap mereka terhadap masalah-masalah tersebut.

Karena itu disamping ilmu-ilmu yang mendasari keahlian, mahasiswa diberi kesempatan pula untuk mengenali atau menguasai ideologi, budaya politik, struktur sosial dan permasalahan kepemimpinan bangsa. Sarana yang mereka perlukan untuk mendapatkan kemampuan non kurikulum tersebut ialah melalui diskusi, dan berorganisasi. **Kedua**, kehidupan kampus yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan kemampuan dan wawasan yang lebih luas tersebut adalah adanya kebebasan ilmiah yang lebih tumpah kalsitas akademik sehingga kampus menjadi pusat pemikiran yang melahirkan gagasan alternatif bagi perbaikan dan pengembangan masyarakat.

**Ketiga**, kondisi di luar kehidupan kampus yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan non-profesional mahasiswa serta lulusan perguruan tinggi ialah ditumbuhkannya sikap politis yang mempercayai mahasiswa seperti adanya sebagai potensi pembangunan, tumbuhnya aktivitas organisasi mahasiswa ekstra universitas, dan lain-lain. Melalui mekanisme seperti itulah, mahasiswa bisa bangkit dan memiliki kemampuan untuk menjadi mo-

<sup>17</sup>Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan : Gerakan Mahasiswa antara Aksi Moral dan Politik*, Yogyakarta : INSIST Press & Pustaka Pelajar, 1999, hal.10

<sup>18</sup>Arbi Sanit, *Op. Cit.*, hal.18



tor perubahan.

Ridwan Saidi menyebutkan mahasiswa pada dasarnya memiliki persepsi politik yang terbentuk dari arus informasi yang dicernanya sehari-hari, melalui proses pertukaran pikiran dengan sesama rekan yang berlangsung secara tidak sengaja dalam kehidupan sehari-hari, realita kehidupan kemasyarakatan yang dapat direkamnya. Ekspresi atau ungkapan, dan persepsi politik yang dimiliki seseorang tergantung dari individu yang bersangkutan. Mereka dapat saja menjadi *reluctant*, bahkan apatis sekalipun dengan kehidupan politik.

Salah satu ekspresi politik mahasiswa dalam bentuk aktif yang di gambarkan oleh Ridwan Saidi adalah keikutsertaan mahasiswa pada organisasi kemahasiswaan. Menurutnya, organisasi mahasiswa sangat penting artinya sebagai arena pengembangan nilai-nilai kepemimpinan. Masalah kepemimpinan bukan sekedar bakat yang secara alami melekat pada seseorang. Kepemimpinan juga tidak dapat dikursuskan. Pengembangan kepemimpinan memerlukan latihan-latihan. Karena itu, organisasi mahasiswa mengemban fungsi sebagai "training ground". Sehingga mahasiswa tidak dipandang sekedar sebagai insan akademis yang cuma tahu lagu, buku dan cinta tanpa kepedulian terhadap masalah sosial kemasyarakatan.<sup>19</sup>

Menurut Almond dan Verba,<sup>20</sup> pemahaman sikap politik tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan politik yang merupakan orientasi politik. Antara lain dinyatakan : " Istilah kebudayaan politik itu terutama mengacu pada orientasi politik, sikap terhadap sistem politik dan bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut."

Dari pengertian diatas dapat dikatakan

bahwa bagi Almond dan Verba sikap politik dan orientasi politik terdapat kesamaan. Selanjutnya dijelaskan bahwa orientasi politik itu terdiri dari:

1. Orientasi kognitif adalah pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajiban, serta input dan outputnya.
2. Orientasi afektif adalah perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktornya dan penampilannya.
3. Orientasi evaluatif adalah keputusan serta pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

## PENUTUP

Dari penjelasan yang diberikan beberapa ahli ilmu politik diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap politik adalah orientasi individu terhadap obyek politik yang terdiri dari tiga komponen yaitu kognitif, afektif dan evaluatif. Kognitif adalah pengetahuan dan kesadaran tentang obyek-obyek politik. Afektif adalah perasaan tentang obyek politik dan evaluatif adalah penilaian serta pendapat tentang obyek politik. Dengan kata lain proses seperti ini memberikan penampilan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa lebih bersifat otonom, meskipun dalam kadar tertentu bisa berubah menjadi partisipasi yang termobilisasikan. Hal ini bergantung pada konsep dan definisi teoritik yang kita batasi, dan akan tercermin bila kita memberi aksentuasi yang penuh ke dalam sebuah kajian serius dalam penelitian.

Bagian akhir tulisan ini hanya ingin mengatakan bahwa studi partisipasi politik yang menjadi bagian penting dalam pendekatan *behavioralism* lebih menekankan pada individu sebagai aktor sebagaimana yang diharapkan bagi negara de-

<sup>19</sup>Ridwan Saidi, *Mahasiswa dan Lingkaran Politik*, Jakarta : lembaga Pers Mahasiswa Mapussy Indonesia, 1989, hal.232.

<sup>20</sup>Gabriel A. Almond & Sidney Verba, *Budaya Politik : Tingkah laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara* Jakarta, Bina Aksara, 1984, hal.14

mokrasi yang menginginkan adanya partisipasi luas yang otonom lebih besar, bukan *mobilize participation*, meskipun Huntington dan Nelson sendiri sulit untuk mendikotomikan diantara keduanya.

Bahwa rasionalisme individu menjadi penting, ketika partisipasi memerlukan sikap objektif individu untuk bertindak, berlaku politik secara arif. Terlepas Huntington masih memungkinkan ketegasan politik penguasa (baca: otoritarianisme) demi stabilitas politik. Bagi Indonesia sebagai negara pasca otoritarianisme, keinginan ini, partisipasi politik otonom dan aktif tersebut diharapkan selalu terus terbanjir, meskipun dalam gonjang-ganjing politik, elit politik masih saja selalu menggunakan paradigma *mobilize* dalam memainkan peranan politiknya.

Pergerakan mahasiswa yang ideal tentunya juga berelasi dengan bentuk partisipasi politik yang otonom karena konsep gerakan yang terbangun akan menjadi lebih murni. Artinya proses pembelajaran politik masyarakat dan khususnya mahasiswa perlu mendapat porsi lebih, karena dengan pemahaman politik yang lebih baik maka konsep keterlibatan individu dalam sebuah partisipasi politik. Sekali lagi pendidikan politik elit dan rasionalitas massa menjadi sesuatu yang *urgan* bagi terciptanya negara demokrasi yang berkeadaban.

#### DAFTAR PUSTAKA :

- Almond, Gabriel A. & Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik : Tingkah laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta, Bina Aksara
- Al-Zastrow, Ngatrawi. 1998. *Reformasi Pemikiran*, Yogyakarta : LKPSM
- Budiardjo, Miriam (ed).1982. *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: PT. Gramedia
- Dodd,C.H.1986. *Pembangunan Politik*, Jakarta: Bina Aksara,
- Hartoko, Dick. 1980. *Golongan Cendekiawan : Mereka yang Berumah diatas Angin*, Jakarta : PT.Gramedia
- Huntington, Samuel.P. 1983. *Tertib Politik di dalam Masyarakat yang Sedang Berubah* , Jakarta: Rajawali Perss
- \_\_\_\_\_, dan Joan M. Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, cetakan kedua, Jakarta: Rineka Cipta
- Kartono, Kartini. 1996. *Pendidikan politik*, Bandung : Mandar Maju
- Mas'oeed, Mohtar dan Colin MacAndrews (ed). 2000. *Perbandingan Sistem Politik*, cetakan kelimabelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Saidi, Ridwan. 1989. *Mahasiswa dan Lingkaran Politik*, Jakarta : Lembaga Pers Mahasiswa Mapussy Indonesia
- Sanit, Arbi. 1999. *Pergolakan Melawan Kekuasaan : Gerakan Mahasiswa antara Aksi Moral dan Politik*, Yogyakarta : INSIST Press & Pustaka Pelajar
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia